



Kegagalan dan Keberhasilan Pasca Proses Pemekaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Syaihidina Hefir¹, Indah Utami², Muhammad Nursyawal³, Muhammad Aidil Zulfa⁴,
Arya Pramudia⁵

¹⁻⁵Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Abstract. Regional expansion in Indonesia, especially in the Riau Islands, is a strategic effort to improve public services and the quality of life. Riau Islands, is a strategic effort to improve public services and accelerate post-1998 reform development. Accelerate post-reform development in 1998. Although it is expected to bring government closer to the people and improve welfare through decentralization through decentralization, the reality is that around 78% of the resulting regions failed to achieve their desired goals. Have failed to achieve their desired goals. This failure caused by various factors, including administrative unpreparedness, high fiscal dependency, political conflicts of interest, and lack of community participation. Community participation. However, this article also highlights examples of successes that show that with local government commitment and commitment of local governments and community support, some regions have been able to improve the quality of public services and optimize their and optimally utilize the potential of natural resources. Factors that influencing this success involve local government commitment, natural resource management, community support, infrastructure availability, and central government policies. This article aims to explore factors contributing to the failure and success of post-regional expansion in the Riau Islands and its impact on society and regional development. With a deeper understanding of this issue, it is hoped that more effective policies can be formulated more effective policies in the management of new autonomous regions to face future development challenges. To face future development challenges.

Keyword: Regional Expansion, Riau Islands, Government.

Abstrak. Pemekaran daerah di Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau, merupakan upaya strategis untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan pasca-reformasi 1998. Meskipun diharapkan dapat mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan melalui desentralisasi, kenyataannya sekitar 78% dari daerah hasil pemekaran mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kegagalan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidaksiapan administratif, ketergantungan fiskal yang tinggi, konflik kepentingan politik, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Namun, artikel ini juga menyoroti contoh-contoh keberhasilan yang menunjukkan bahwa dengan komitmen pemerintah daerah dan dukungan masyarakat, beberapa daerah mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini melibatkan komitmen pemerintah daerah, pengelolaan sumber daya alam, dukungan masyarakat, ketersediaan infrastruktur, dan kebijakan pemerintah pusat. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan pasca pemekaran daerah di Kepulauan Riau serta dampaknya terhadap masyarakat dan pembangunan daerah. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu ini, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan daerah otonom baru untuk menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.

Kata kunci: Pemekaran Daerah, Kepulauan Riau, Pemerintahan.

1. PENDAHULUAN

Pemekaran daerah di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. Di Kepulauan Riau, pemekaran daerah telah menjadi fenomena yang signifikan sejak reformasi 1998, dengan harapan untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan melalui desentralisasi. Namun, realitas pasca pemekaran seringkali tidak sesuai dengan harapan (Arianto & Afrizal, 2013).

Berdasarkan data yang ada, sekitar 78% dari daerah hasil pemekaran di Indonesia, termasuk di Kepulauan Riau, mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kegagalan ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti ketidaksiapan administratif, ketergantungan fiskal yang tinggi, serta konflik kepentingan politik yang menghambat proses pembangunan. Di sisi lain, terdapat pula contoh keberhasilan yang menunjukkan bahwa dengan komitmen dan pengelolaan yang baik, beberapa daerah mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Kegagalan ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidaksiapan administratif, ketergantungan fiskal, konflik kepentingan politik, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Di sisi lain, terdapat juga contoh keberhasilan yang menunjukkan bahwa dengan komitmen pemerintah daerah dan dukungan masyarakat, beberapa daerah mampu meningkatkan akses terhadap layanan publik dan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara optimal.

Latar belakang ini menimbulkan pertanyaan penting: Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dan keberhasilan pasca pemekaran daerah di Kepulauan Riau? Pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan daerah otonom baru. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas secara komprehensif mengenai kegagalan dan keberhasilan pasca pemekaran daerah di Kepulauan Riau, serta dampaknya terhadap masyarakat dan pembangunan daerah. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengambil kebijakan dan masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.

2. LANDASAN TEORI

Pemekaran daerah dapat dipahami sebagai proses pembagian suatu wilayah administratif menjadi dua atau lebih daerah otonom baru. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Beberapa teori yang mendasari pemekaran daerah meliputi:

1. Teori Otonomi Daerah: Otonomi daerah adalah hak dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. (PEMERINTAHAN DAERAH, 2004), otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. daerah baru untuk mengelola sumber daya dan melayani masyarakat secara lebih efektif.
2. Teori Desentralisasi: Desentralisasi merupakan pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Menurut (Widodo, 2010) desentralisasi memungkinkan keterwakilan yang lebih besar bagi berbagai kelompok politik, agama, etnis, dan suku dalam pengambilan keputusan.
3. Teori Kemandirian Daerah: Kemandirian daerah menjadi kunci dalam menentukan keberhasilan pemekaran. Daerah yang mampu mengelola sumber daya alam dan potensi lokal dengan baik cenderung lebih berhasil dalam mencapai tujuan pembangunan. Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi, potensi sumber daya alam, serta dukungan sosial budaya adalah faktor-faktor penting dalam menentukan keberhasilan pemekaran.
4. Teori Identitas Sosial: Pemekaran daerah sering kali dipicu oleh perbedaan identitas sosial antara masyarakat di daerah pemekaran dengan daerah induknya. Masyarakat yang merasa memiliki identitas budaya, etnis, atau sejarah yang berbeda cenderung mendorong pemekaran untuk mendapatkan pengakuan dan otonomi yang lebih besar. Hal ini tercermin dalam aspirasi masyarakat untuk membentuk daerah otonom baru yang lebih sesuai dengan karakteristik lokal mereka.
5. Teori Insentif Fiskal: Insentif fiskal menjadi salah satu alasan penting bagi pemekaran daerah. Adanya anggaran tersendiri dari pemerintah pusat untuk daerah otonom baru sering kali menjadi daya tarik bagi masyarakat dan elit politik untuk mengusulkan pemekaran. Insentif ini diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah baru (Meilani, 2017).

6. Tujuan Pemekaran

Pemekaran daerah bertujuan untuk:

- Meningkatkan Pelayanan Publik: Dengan pembagian wilayah yang lebih kecil, diharapkan pelayanan publik dapat lebih cepat dan efisien.
- Percepatan Pembangunan Ekonomi: Pemekaran memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal secara optimal.
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Dengan adanya pemerintahan yang lebih dekat, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
- Pengembangan Demokrasi Lokal: Pemekaran diharapkan dapat memperkuat demokrasi di tingkat lokal melalui pembagian kekuasaan yang lebih adil (Tenrini, 2012).

Landasan Hukum

Pemekaran daerah di Indonesia, termasuk di Kepulauan Riau, memiliki landasan hukum yang kuat yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang relevan dalam proses pemekaran daerah:

1. Undang-Undang Dasar 1945: Pasal 18 UUD 1945 mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan tentang pemekaran, pasal ini memberikan dasar bagi pengakuan dan penghormatan terhadap satuan pemerintahan daerah. Pasal 18B ayat 1 menyatakan bahwa "Negara mengakui serta menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang." Hal ini memberikan legitimasi bagi pembentukan dan pemekaran daerah otonom (Gupta, 2004)
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004: Undang-Undang ini menggantikan UU No. 22 Tahun 1999 dan mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Dalam (PEMERINTAHAN DAERAH, 2004), pemekaran daerah diatur sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan. Pasal 4 menyatakan bahwa pembentukan daerah dapat dilakukan melalui pemekaran dari satu daerah menjadi dua atau lebih, dengan syarat-syarat tertentu.
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014: (INDONESIA, 2014) tentang Pemerintahan Daerah memperkuat ketentuan mengenai pemekaran daerah. Menurut Pasal 32, pembentukan daerah dapat dilakukan melalui pemekaran dan penggabungan daerah. UU ini juga menetapkan persyaratan untuk pemekaran, termasuk keharusan untuk

melalui tahapan daerah persiapan selama tiga tahun agar daerah baru siap dalam mengurus kepentingan masyarakatnya.

4. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000, 2000): Peraturan ini mengatur tentang persyaratan, pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. PP No. 129/2000 menetapkan kriteria dan prosedur untuk pemekaran daerah, termasuk syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan yang harus dipenuhi sebelum suatu daerah dapat dimekarkan.
5. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007: PP ini mengatur tata cara dan prosedur pemekaran daerah serta memberikan pedoman bagi pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004. Dalam peraturan ini dijelaskan langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah pusat dan daerah dalam proses pemekaran (Muqoyyidin, 2013).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini mencakup beberapa pendekatan yang komprehensif untuk menganalisis pemekaran daerah di Kepulauan Riau. Pertama, literature review dilakukan untuk mengkaji teori-teori yang mendasari pemekaran daerah, seperti teori otonomi daerah, desentralisasi, kemandirian daerah, identitas sosial, dan insentif fiskal. Kedua, analisis data empiris diterapkan dengan mengevaluasi statistik keberhasilan dan kegagalan daerah hasil pemekaran berdasarkan laporan dari Kementerian Dalam Negeri. Ketiga, studi kasus digunakan untuk mengidentifikasi contoh-contoh spesifik daerah yang berhasil dan gagal dalam mencapai tujuan pemekaran. Keempat, analisis deskriptif dilakukan untuk menggali faktor-faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan tersebut, termasuk ketidaksiapan administratif, ketergantungan fiskal, konflik kepentingan politik, serta partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dampak pemekaran daerah terhadap masyarakat dan pembangunan di Kepulauan Riau.

4. PEMBAHASAN

Pemekaran daerah di Kepulauan Riau merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa proses pemekaran ini tidak selalu berhasil. Dalam pembahasan ini, penulis akan menyajikan lebih dalam mengenai kegagalan dan keberhasilan pasca pemekaran daerah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kedua aspek tersebut.

1. Pemekaran Daerah: Konsep dan Tujuan

Pemekaran daerah adalah proses pembentukan daerah otonom baru dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Proses ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan: Dengan membagi wilayah menjadi daerah yang lebih kecil, diharapkan pemerintahan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- Mendorong Pembangunan Ekonomi: Daerah otonom baru diharapkan mampu mengelola sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Pemekaran memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan di tingkat local (Lelyana & Sarjito, 2024).

2. Kegagalan Pasca Pemekaran

Berdasarkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, hanya sekitar 22% dari daerah pemekaran yang berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, sementara sisanya 78% mengalami kegagalan (Tenrini, 2013). Beberapa faktor penyebab kegagalan tersebut meliputi:

- a) Ketidaksiapan Administratif: Banyak daerah hasil pemekaran tidak memiliki infrastruktur pemerintahan yang memadai. Hal ini mencakup kurangnya fasilitas fisik seperti gedung pemerintahan, serta kekurangan sumber daya manusia yang terlatih untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Sebagai contoh, beberapa kabupaten baru di Kepulauan Riau mengalami kesulitan dalam mengelola administrasi publik karena minimnya pegawai negeri sipil (PNS) yang berkualitas (Provinsi Kepri, 2021).
- b) Ketergantungan Fiskal Daerah: Pemekaran sering kali mengalami ketergantungan yang tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat. Tanpa adanya sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup, banyak daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini menyebabkan stagnasi dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik, yang pada gilirannya memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat (Puspita & Hamidi, 2021).
- c) Konflik Kepentingan Politik: Proses pemekaran sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik lokal. Banyak elit politik yang mendorong pemekaran untuk mendapatkan posisi kekuasaan baru tanpa mempertimbangkan kesiapan daerah dan kebutuhan masyarakat. Ketidakpastian politik ini dapat mengganggu stabilitas

pemerintahan dan menghambat pelaksanaan program-program pembangunan (Nurmiyati, 2021).

- d) Kurangnya Partisipasi Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terakomodasi. Di beberapa daerah, kurangnya sosialisasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menyebabkan ketidakpuasan dan penolakan terhadap kebijakan yang diterapkan.
- e) Moratorium Daerah Otonomi Baru: Salah satu faktor utama kegagalan pemekaran adalah moratorium yang diberlakukan oleh pemerintah pusat terhadap pembentukan daerah otonomi baru. Hal ini menghambat aspirasi daerah seperti Kepulauan Kundur untuk mendapatkan status sebagai daerah otonom baru (Dedeh Haryati, 2014).
- f) Ketidacukupan Sumber Daya: Banyak daerah yang dimekarkan menghadapi masalah ketidacukupan sumber daya untuk mendukung otonomi mereka. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa banyak daerah baru tidak memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memadai untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri.
- g) Ketimpangan Pembangunan: Meskipun ada beberapa keberhasilan, ketimpangan pembangunan tetap menjadi isu besar. Kota Batam sebagai pusat ekonomi sering kali menyerap lebih banyak sumber daya dan perhatian dibandingkan dengan daerah lain di Kepri, menyebabkan disparitas dalam pembangunan antar wilayah.
- h) Konflik Sosial dan Politik: Proses pemekaran sering kali disertai dengan konflik kepentingan di antara elit politik lokal dan masyarakat. Banyak keputusan terkait pemekaran dipengaruhi oleh kepentingan politik, yang dapat mengabaikan kebutuhan nyata masyarakat.

3. Faktor Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pemekaran daerah di Kepulauan Riau tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung. Meskipun banyak daerah hasil pemekaran yang mengalami kegagalan, terdapat pula contoh-contoh keberhasilan yang menunjukkan bahwa dengan strategi dan pendekatan yang tepat, pemekaran dapat membawa dampak positif bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa faktor penyebab keberhasilan pasca pemekaran:

- a) Komitmen Pemerintah Daerah: Keberhasilan pasca pemekaran juga sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Pemerintah yang memiliki visi dan misi yang jelas serta rencana strategis yang terukur akan lebih mampu mengimplementasikan program-program

pembangunan yang efektif. Misalnya, pemerintah daerah yang berhasil sering kali memiliki kebijakan yang mendukung pengalokasian dana untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan pendidikan.

- b) **Pengelolaan Sumber Daya Alam:** Daerah yang berhasil biasanya memiliki potensi sumber daya alam yang dikelola dengan baik. Misalnya, pengelolaan sektor perikanan dan pariwisata di beberapa wilayah Kepulauan Riau telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
- c) **Dukungan Masyarakat:** Dukungan masyarakat merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pemekaran. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemekaran, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terakomodasi. Di beberapa daerah, seperti Desa Watu Omok, masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi terhadap pemekaran dengan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memberikan masukan dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh pemerintah. Partisipasi ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kemajuan daerah.
- d) **Ketersediaan Infrastruktur:** Ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi syarat penting untuk mendukung keberhasilan pemekaran. Infrastruktur transportasi, komunikasi, pendidikan, dan kesehatan yang baik akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Daerah yang berhasil umumnya memiliki rencana pembangunan infrastruktur yang jelas dan didukung oleh anggaran yang cukup.
- e) **Kebijakan Pemerintah Pusat:** Kebijakan pemerintah pusat juga berperan penting dalam mendukung keberhasilan daerah hasil pemekaran. Dukungan dalam bentuk alokasi dana, pelatihan sumber daya manusia, dan bimbingan teknis dari pemerintah pusat dapat membantu daerah baru untuk mengatasi tantangan awal setelah pemekaran. Selain itu, adanya regulasi yang jelas mengenai tata cara pengelolaan daerah otonom baru juga membantu mempercepat proses adaptasi pemerintahan lokal.
- f) **Faktor Demografi:** Jumlah penduduk dan karakteristik demografi suatu daerah juga mempengaruhi keberhasilan pemekaran. Daerah dengan populasi yang cukup besar dan beragam dapat lebih mudah mengembangkan potensi ekonomi dan sosialnya.

Ketersediaan tenaga kerja yang terampil serta pasar lokal yang cukup besar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pasca pemekaran.

- g) Peningkatan Pelayanan Publik: Pemekaran daerah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Di beberapa daerah, seperti Kabupaten Bintan dan Natuna, pemekaran telah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah yang lebih baik.
- h) Pembangunan Infrastruktur: Beberapa daerah pemekaran di Kepri telah mengalami peningkatan infrastruktur, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Misalnya, pembangunan jalan dan fasilitas umum lainnya telah membantu mengurangi kesenjangan antara daerah pusat dan pinggiran.
- i) Peningkatan Ekonomi: Pemekaran di beberapa wilayah juga membawa dampak positif dalam hal pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Karimun dan Bintan menunjukkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang signifikan, mencerminkan perkembangan ekonomi yang lebih baik.

4. Dampak Sosial dan Ekonomi

Pemekaran daerah di Kepulauan Riau telah membawa berbagai dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Meskipun tujuan utama dari pemekaran adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, hasilnya bervariasi antara daerah yang berhasil dan yang gagal. Dalam pembahasan ini, kita akan mengkaji dampak sosial dan ekonomi yang muncul setelah pemekaran daerah.

A. Dampak Sosial

Dampak sosial dari pemekaran daerah bervariasi antara keberhasilan dan kegagalan. Di daerah yang berhasil, terdapat peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan lokal. Sebaliknya, di daerah yang gagal, sering terjadi penurunan kualitas layanan publik, konflik sosial, dan ketidakpuasan masyarakat.

1) Peningkatan Akses terhadap Layanan Publik

Salah satu dampak positif dari pemekaran adalah peningkatan akses masyarakat terhadap layanan publik. Dengan terbentuknya daerah otonom baru, jarak geografis antara masyarakat dan pusat pemerintahan menjadi lebih dekat, sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan. Misalnya, di beberapa daerah pemekaran, jumlah fasilitas pendidikan seperti sekolah dasar dan menengah meningkat, serta adanya peningkatan layanan kesehatan melalui pembangunan puskesmas dan posyandu.

2) Perubahan dalam Struktur Sosial

Pemekaran daerah dapat mempengaruhi struktur sosial masyarakat. Di satu sisi, pemekaran dapat memperkuat identitas lokal dan rasa kebersamaan di antara warga daerah baru. Namun, di sisi lain, pemekaran juga berpotensi menimbulkan konflik horizontal jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya, perasaan egosentrisme dapat muncul di kalangan masyarakat yang merasa lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain.

3) Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dengan adanya pemekaran, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Hal ini dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap daerah dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan. Namun, partisipasi ini juga tergantung pada seberapa baik pemerintah daerah mengkomunikasikan rencana dan program kepada masyarakat.

B. Dampak Ekonomi

Secara ekonomi, daerah yang berhasil cenderung menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah yang gagal. Keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan investasi lokal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

1) Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Secara umum, pemekaran daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya lokal yang lebih baik. Beberapa studi menunjukkan bahwa setelah pemekaran, terdapat peningkatan pendapatan per kapita di beberapa daerah akibat adanya alokasi dana dari pemerintah pusat serta peningkatan investasi lokal.

2) Ketergantungan Terhadap Dana Alokasi Umum (DAU)

Meskipun ada peningkatan pendapatan, banyak daerah hasil pemekaran yang masih bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa meskipun secara nominal pendapatan meningkat, kemandirian fiskal belum sepenuhnya tercapai. Hal ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menciptakan ketidakstabilan keuangan daerah.

4) Pembangunan Infrastruktur

Pemekaran sering kali disertai dengan pembangunan infrastruktur yang lebih baik, termasuk jalan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi juga membuka peluang ekonomi baru melalui

peningkatan mobilitas dan aksesibilitas. Namun, keberhasilan infrastruktur ini sangat bergantung pada perencanaan yang baik dan alokasi anggaran yang tepat (Iptek & Lipi, 2015)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa pemekaran daerah di Kepulauan Riau, meskipun bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan, sering kali tidak mencapai hasil yang diharapkan. Sekitar 78% dari daerah hasil pemekaran mengalami kegagalan, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidaksiapan administratif, ketergantungan fiskal yang tinggi, konflik kepentingan politik, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Di sisi lain, terdapat contoh keberhasilan di beberapa daerah yang menunjukkan bahwa dengan komitmen pemerintah daerah dan dukungan masyarakat, pemekaran dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pemekaran agar kebijakan pengelolaan daerah otonom baru dapat dirumuskan dengan lebih efektif. Dengan demikian, pemekaran daerah harus didukung oleh infrastruktur yang memadai, pengelolaan sumber daya yang baik, serta partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan analisis pemekaran daerah di Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. **Penguatan Infrastruktur:** Pemerintah daerah perlu fokus pada pembangunan infrastruktur yang memadai, termasuk fasilitas pemerintahan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Infrastruktur yang baik akan mendukung operasional pemerintahan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik.
2. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia:** Penting untuk melatih dan mengembangkan kapasitas pegawai negeri sipil (PNS) agar mampu menjalankan fungsi pemerintahan dengan efektif. Pelatihan ini harus mencakup manajemen administrasi, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya.
3. **Diversifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD):** Daerah pemekaran harus berupaya mengembangkan sumber pendapatan asli yang berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat. Ini bisa dilakukan melalui pengembangan potensi ekonomi lokal, seperti pariwisata dan sektor perikanan.

4. Mendorong Partisipasi Masyarakat: Pemerintah perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sosialisasi yang baik dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.
5. Kebijakan yang Transparan dan Akuntabel: Implementasi kebijakan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Hal ini juga penting untuk mencegah konflik kepentingan politik yang dapat menghambat pembangunan.
6. Dukungan dari Pemerintah Pusat: Diperlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat dalam bentuk alokasi dana, pelatihan, dan bimbingan teknis untuk membantu daerah baru menghadapi tantangan setelah pemekaran.

DAFTAR REFERENSI

- Arianto, B., & Afrizal, A. (2013). Fenomena pemekaran daerah di Provinsi Kepulauan Riau (Studi pemekaran daerah di Kabupaten Bintan). *Jurnal Selat*, 1(1), 33–44. Retrieved from <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/107>
- Dedeh Haryati. (2014). Pembentukan 19 daerah otonom baru. *Jurnal Otonomi Daerah*, IV(07), 17–20.
- Gupta, R. (2004). Pengaturan tentang pemerintahan daerah disebutkan dalam pasal 18B ayat (1) UUD 1945. *CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison, 2004*(May), 352. Retrieved from <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract>
- Indonesia, P. R. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 1(22 Jan), 1–17.
- Iptek, J., & Lipi, R. (2015). Rencana strategis. *Jurnal Penelitian IPTEK*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/351.077>
- Lelyana, N., & Sarjito, A. (2024). Dampak pemekaran daerah terhadap pertahanan negara: Studi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(1), 29–45.
- Meilani, H. (2017). *Optimalisasi kebijakan penerimaan daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Expansion and special autonomy post-reform governance in Indonesia: Concept, empirical facts, and future recommendations. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 1–23.
- Nurmiyati, N. (2021). Politik sumber daya alam: Studi terhadap kepentingan elit politik lokal dalam pemekaran wilayah di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 6(1), 49. <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i1.29810>

Pemerintahan Daerah. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. *Metallurgical and Materials Transactions A*, 30(8).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000. (2000). Persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah.

Provinsi Kepri. (2021). *Laporan kinerja pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021*. PDIP Kepri.

Puspita, D., & Hamidi, U. S. (2021). *Desentralisasi fiskal: Dua dekade implementasi*. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tenrini, R. H. (2012). Pemekaran daerah: Kebutuhan atau euforia demokrasi? *Pusat Kebijakan APBN, BKF*, 1–9.

Tenrini, R. H. (2013). Pemekaran daerah: Kebutuhan atau euforia demokrasi? Menyibak kegagalan pemekaran. *Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara*, 1.

Widodo, T. (2010). Desentralisasi asimetris dan/dalam negara kesatuan. *Journal Administrator Borneo*, 6(2), 4.